

ANALISIS IMPLEMENTASI TINGKAT KESADARAN, PENGAWASAN DAN SANKSI TERHADAP KEBIJAKAN PERDA KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) NOMOR 7 TAHUN 2013 DI RUMAH SAKIT TK. III DR. R. SOEHARSONO BANJARMASIN TAHUN 2023

Rasyifa Elsa Halizah¹, Asrinawaty², Elsi Setiandari Lely Octaviana³

¹Kesehatan Masyarakat, 13201, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM. 19070286

²Kesehatan Masyarakat, 13201, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1107118303

³Kesehatan Masyarakat, 13201, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1126018602

Jl. Trans Kalimantan, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, 70582, Kalimantan Selatan

E-mail: rasyifaelsah@gmail.com, +62 821-4993-9350

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh negara untuk setiap warganya. Salah satu perilaku masyarakat Indonesia yang berdampak negatif bagi kesehatan individu dan lingkungan adalah merokok. Merokok selain berbahaya bagi diri sendiri juga membahayakan kesehatan orang lain yang memiliki hak untuk menghirup udara yang bersih. Menurut WHO tahun 2017 menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-3 dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah China dan India. Jumlah perokok di Indonesia mencapai 35% dari total populasi, atau sekitar 75 juta jiwa, pertumbuhan prevalensi perokok pada anak-anak dan remaja yang tercatat di dunia sebesar 19,4%. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat kesadaran, pengawasan, dan sanksi terhadap kebijakan PERDA Nomor 7 Tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, penelitian ini bersifat In-Depth Interview yaitu melakukan wawancara mendalam terhadap informan agar diketahui secara jelas dan mendalam. Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat kesadaran, masih banyak perokok yang masih merokok walaupun di lingkungan tersebut sudah ada tanda larangan merokok, dan 3 dari 4 informan mengetahui adanya PERDA Nomor 7 Tahun 2013. Mengenai pengawasan 4 informan menyebutkan bahwa pengawasan terhadap peraturan KTR di Rumah Sakit masih dilakukan oleh petugas jaga piket, perawat dan karyawan yang bekerja, masih belum ada bidang khusus yang mengawasi aturan tersebut dan sejauh ini masih efektif. Sedangkan untuk sanksi beberapa informan menyebutkan bahwa sejauh ini di kawasan Rumah Sakit hanya menerapkan sanksi teguran, tindakan fisik untuk anggota TNI bahkan SP. Diharapkan kepada pihak Rumah Sakit agar terus meningkatkan pengawasan terhadap aturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Rumah Sakit.

Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Rokok, Kesadaran, Pengawasan, Sanksi

ABSTRACT

Health is a human right that must be fulfilled by the state for every citizen. One of the behaviors of the Indonesian people that has a negative impact on individual health and the environment is smoking. Smoking is not only harmful to oneself but also to the health of other people who have the right to breathe clean air. According to WHO in 2017, Indonesia was ranked 3rd with the largest number of smokers in the world after China and India. The number of smokers in Indonesia reaches 35% of the total population, or around 75 million people, the growth in the prevalence of smokers in children and adolescents recorded in the world is 19.4%. The purpose of this research is to analyze the level of awareness, supervision, and sanctions against Regional Regulation No. 7 of 2013. The type of research used in this research is a case study, and deep. Based on the results of the study regarding the level of awareness, there were still many smokers who still smoked even though there was a smoking ban sign in that environment, and 3 out of 4 informants were aware of the existence of regional regulation number 7 of 2013. Regarding supervision, 4 informants stated that supervision of KTR regulations in hospitals was still carried out by picket duty officers, nurses and employees who work, there is still no special field that oversees the regulation and so far it is still effective. As for the sanctions, several informants stated that so far in the hospital area they had only applied reprimands, physical actions for members of the TNI and even SP. It is hoped that the hospital will continue to improve supervision of the No-Smoking Area rules in the Hospital environment.

Keywords: Non-Smoking Areas, Cigarettes, Awareness, Supervision, Sanctions

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Resty. (2019). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Merokok Masyarakat desa Pandan Sari. *Journal Of Health Science (Jurnal Ilmu Kesehatan)*Vol. VNo. IITahun 2020| 92–102, 92-102.
- Alvina Puspitasari. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Bulukumba. Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/19641/>. (diakses 12 Mei 2023) Tikirik, W. O., Pratiwi, A. R., Utari, A. Y., Ahmad, A., Anas, A., Fajriansyah, A., ... & David, D. (2022). Gambaran Pengelolaan Manajemen Logistik Obat Dan Alkes di Instalasi Farmasi Kabupaten Mamuju Tengah. *Jurnal Promotif Preventif*, 5(1), 95-105.
- Kwe Fei Lie. (2020). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Rumah Sakit Ngudi Waluyo. *Jurnal Ilmiah*, 1-8.
- Mira Ramadhana Tajmahal. (2021). Kontribusi program pamsimas terhadap perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat di desa sungai rangas tengah kecamatan martapura barat kabupaten Banjar. Skripsi. Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Banjarmasin
- Nadya Anastasia Putri.(2020). Hubungan Pendidikan, Pengetahuan Dan Sikap Dengan Kepatuhan Pada Perda KTR Nomor 7 Tahun 2013 Di Rumah Sakit TK. III Dr. R.Soeharsono Banjarmasin Tahun 2020. Skripsi. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Peraturan Daerah No.7 Tahun 2013. Peraturan kawasan Tanp rokok kota Banjarmasin.
- Rin Agustina. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa
- Riskesdas. (2018). Prevalensi Perokok di Indonesia.